



Katalog BPS : 9302004.6401

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PASER
MENURUT PENGELUARAN**

2011-2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PASER
MENURUT PENGELUARAN
2011 - 2015**

No. Katalog : 9302004.6401
No. Publikasi : 64.015.16.05
Ukuran buku : 21 cm x 28 cm
Jumlah halaman : x + 56 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Penyunting :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Gambar kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://paserkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser menurut Pengeluaran Tahun 2011-2015* merupakan pasangan dari publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser menurut Lapangan Usaha. Publikasi PDRB menurut Pengeluaran memberikan gambaran mengenai produk domestik regional yang diuraikan dalam komponen-komponen pengeluaran. Komponen-komponen tersebut adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto (Ekspor dikurangi dengan Impor).

Adapun data yang dipakai dalam penghitungan komponen-komponen PDRB menurut Pengeluaran diperoleh dari dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun pihak swasta, juga data yang bersumber dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan publikasi ini akan membantu pihak perencana daerah, para analis, serta lembaga/instansi pemerintah lainnya maupun pihak swasta.

Disadari dalam penerbitan kali ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat penyempurnaan pada penerbitan yang akan datang. Dengan demikian saran dan kritik dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Tana Paser, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Paser,



Ir. BAHRAMSYAH

<http://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	4
1.3. Kegunaan Statistik PDRB.....	8
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT).....	10
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P).....	13
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15
2.5. Perubahan Inventori (PI).....	17
2.6. Ekspor dan Impor.....	19

BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PASER TAHUN 2011 - 2015.....	21
3.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran.....	22
3.2. Perkembangan Komponen PDRB Kab. Paser Menurut Pengeluaran...	28
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga	28
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT	31
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	31
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	33
3.2.5. Perubahan Inventori	34
3.2.6. Ekspor Neto	35
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2011 – 2015	37
4.1. PDRB (Nominal)	38
4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	39
4.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	40
BAB V. PENUTUP	43
LAMPIRAN (Tabel-tabel)	45
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Miliar Rupiah).....	22
Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Miliar Rupiah).....	23
Tabel 3.. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Persen).....	25
Tabel 4.. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Persen).....	26
Tabel 5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2015 (2010 = 100).....	27
Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Paser Tahun 2011—2015.....	29
Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Paser Tahun 2011—2015 (Persen).....	30
Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser Tahun 2011—2015 (Persen).....	30
Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015.....	31
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2011- 2015.....	32
Tabel 11. Perkembangan PMTB Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015.....	34

Tabel 12.	Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Paser Tahun 2011 — 2015.....	35
Tabel 13.	Perkembangan Ekspor Neto Kabupaten Paser Tahun 2011 — 2015.....	36
Tabel 14.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Paser Tahun 2011—2015.....	38
Tabel 15.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (persen).....	39
Tabel 16.	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Paser Tahun 2011-2015.....	41

<http://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015	23
Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015	24
Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah).....	24
Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2015 (persen).....	26
Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Persen).....	27

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)	46
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)	47
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Persen)	48
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Persen)	49
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Persen)	50
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Persen)	51
Tabel 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015	52
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran , Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015	53

BAB 1
PENDAHULUAN

<http://paserkab.bps.go.id>



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten Paser menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
 - Valuasi
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.
 - Klasifikasi
Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000		PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga		1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto		3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori		4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor		5. Perubahan Inventori
6. Impor		6. Ekspor
		7. Impor

1.3 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara/wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara/wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara/wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB 2

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://paserkab.bps.go.id>



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten Paser yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga. LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai

penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kabupaten Paser mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kabupaten Paser mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten Paser; b). PK-P Kabupaten Paser yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kabupaten Paser.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kabupaten Paser tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kabupaten Paser Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan,

transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjenk Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = (Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -

Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR dan IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi

barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kabupaten Paser terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/Kabupaten Paser
- b. Impor dari luar provinsi/Kabupaten Paser.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Ekspor Neto.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kabupaten Paser didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kabupaten Paser diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen.

BAB 3
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2011 - 2015

<http://paserkab.bps.go.id>



3.1 PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga Berlaku di tahun 2015 menurun sebesar 2,48%, yakni dari 39.249,89 miliar Rupiah pada tahun 2014 menjadi 38.274,55 miliar Rupiah pada tahun 2015. Penurunan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume, Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) Konstan 2010, juga mengalami penurunan, yakni dari 34.783,34 miliar Rupiah pada tahun 2014 menjadi 34.446,79 miliar Rupiah pada tahun 2015, atau menurun sebesar 0,97%.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Paser periode 2011 – 2015, yakni sebesar 8,30 %; 6,05 %; 6,81%; 4,51 % dan -0,97%. Pelemahan dan penurunan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Perubahan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Paser pada periode tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini :

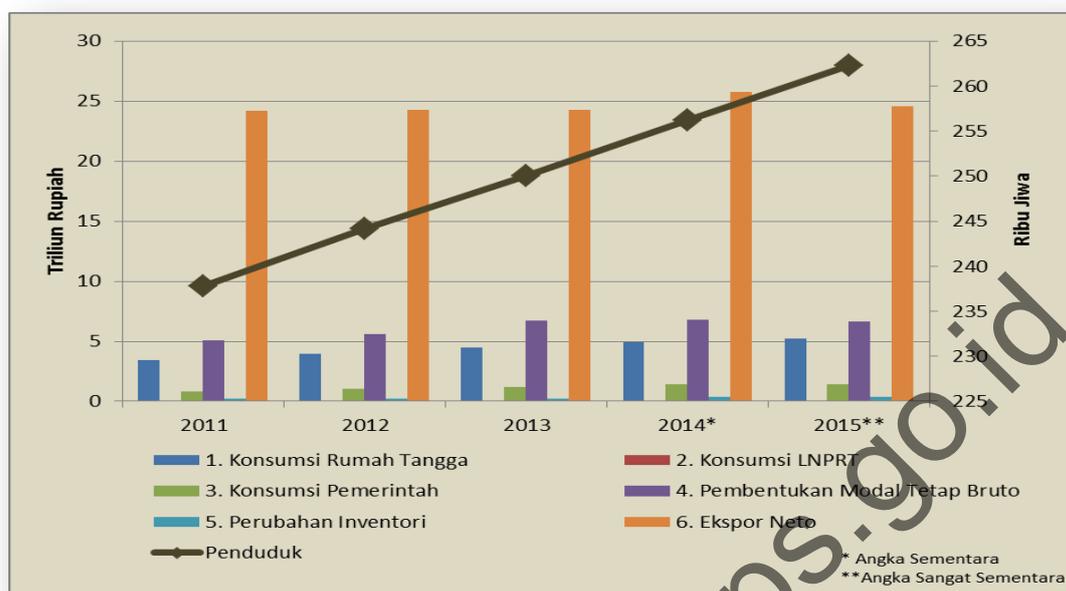
Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.448,16	3.964,98	4.472,39	4.932,08	5.189,65
2. Konsumsi LNPRT	31,80	35,19	42,85	52,80	60,92
3. Konsumsi Pemerintah	843,17	1.028,90	1.201,84	1.387,99	1.401,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.041,98	5.566,73	6.690,78	6.761,55	6.667,95
5. Perubahan Inventori	208,45	238,64	247,01	349,64	369,65
6. Ekspor Neto	24.171,22	24.259,00	24.261,41	25.765,83	24.585,17
PDRB	33.744,79	35.093,42	36.916,27	39.249,89	38.274,55

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Paser pada periode 2011-2015 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini :

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Miliar Rupiah)

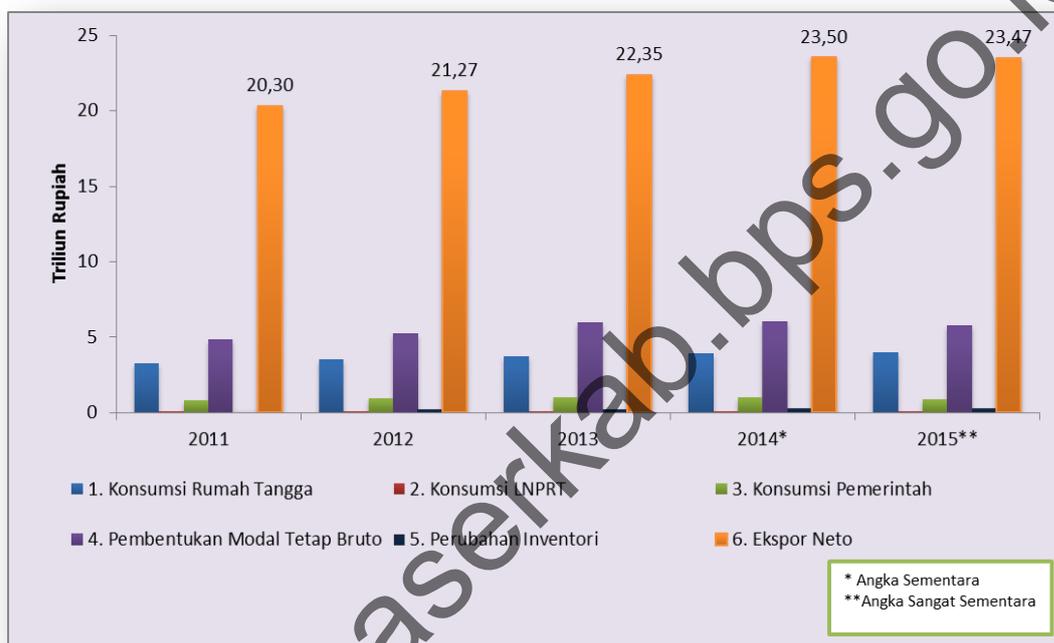
Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.231,11	3.491,41	3.695,48	3.905,39	3.973,84
2. Konsumsi LNPRT	30,22	31,78	36,77	42,66	46,57
3. Konsumsi Pemerintah	828,68	934,38	1.030,06	1.020,96	874,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.813,62	5.216,23	5.945,15	6.006,64	5.770,43
5. Perubahan Inventori	181,51	211,89	222,70	306,35	313,52
6. Ekspor Neto	20.298,11	21.274,55	22.351,06	23.501,34	23.468,08
PDRB	29.383,23	31.160,23	33.281,22	34.783,34	34.446,79

* Angka sementara

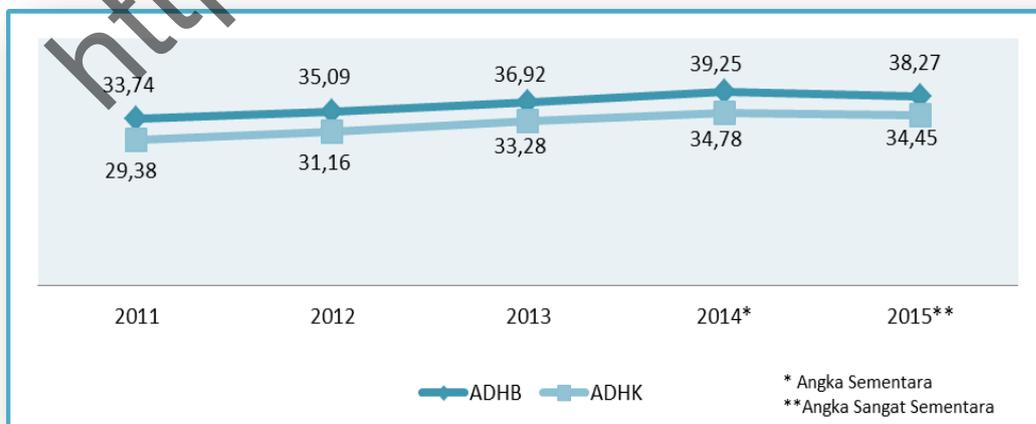
** Angka sangat sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa pada tahun 2011 – 2015 nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Paser meningkat, yakni sebesar 29.383,23 miliar Rupiah (2011); 31.160,23 miliar Rupiah (2012); 33.281,22 miliar Rupiah (2013); 34.783,34 miliar Rupiah (2014); dan turun pada tahun 2015 menjadi 34.446,79 miliar Rupiah (2015). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa dari tahun 2010 Ekspor Neto terus mengalami kenaikan, dari 20,30 Triliun rupiah pada tahun 2010, menjadi 23,50 Triliun rupiah pada tahun 2014, dan sedikit menurun pada tahun 2015 menjadi 23,47 Triliun rupiah.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 - 2015



Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10,22	11,30	12,11	12,57	13,56
2. Konsumsi LNPRT	0,09	0,10	0,12	0,13	0,16
3. Konsumsi Pemerintah	2,50	2,93	3,26	3,54	3,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,94	15,86	18,12	17,23	17,42
5. Perubahan Inventori	0,62	0,68	0,67	0,89	0,97
6. Ekspor Neto	71,63	69,13	65,72	65,65	64,23
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

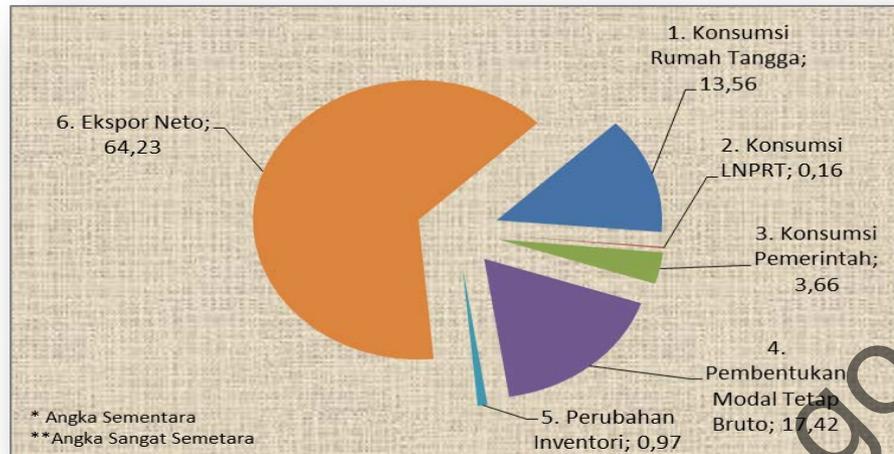
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2011-2015, PDRB Kabupaten Paser, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor) yang selalu diatas 60 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 14,94 persen s.d 17,42 persen. Sedangkan Kontribusi paling kecil ialah konsumsi LNPRT yang berkisar antara 0,09 s.d. 0,16 persen. Untuk kondisi persentase kontribusi pada tahun 2015, dapat dilihat lebih jelas pada Grafik 4.

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2015 (persen)



Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2011 - 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser cenderung mengalami perlambatan, puncaknya pada tahun 2015 mengalami kontraksi sebesar 0,97 persen. Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama

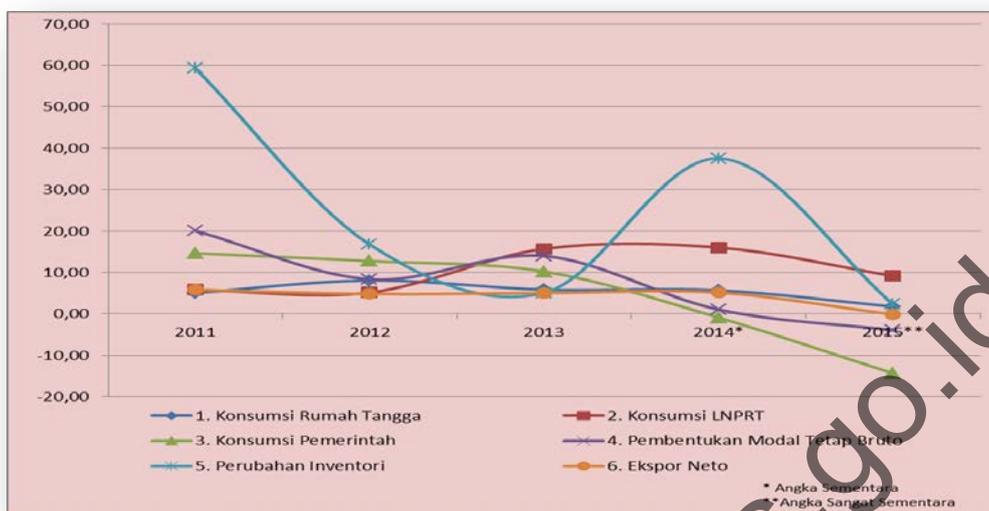
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 - 2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,08	8,06	5,84	5,68	1,75
2. Konsumsi LNPRT	5,80	5,17	15,71	16,02	9,16
3. Konsumsi Pemerintah	14,62	12,76	10,24	-0,88	-14,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,07	8,36	13,97	1,03	-3,93
5. Perubahan Inventori	59,29	16,74	5,10	37,56	2,34
6. Ekspor Neto	5,82	4,81	5,06	5,15	-0,14
PDRB	8,30	6,05	6,81	4,51	-0,97

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Persen)



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2010 – 2015, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2015 (2010 = 100)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	106,72	113,56	121,02	126,29	130,60
2. Konsumsi LNPRT	100,00	105,24	110,74	116,53	123,76	130,83
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	101,75	110,12	116,68	135,95	160,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	104,74	106,72	112,54	112,57	115,55
5. Perubahan Inventori	100,00	114,84	112,62	110,92	114,13	117,90
6. Ekspor Neto	100,00	119,08	114,03	108,55	109,64	104,76
PDRB	100,00	114,84	112,62	110,92	112,84	111,11

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

⁶ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Paser, untuk periode 2011 – 2015.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Paser ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Paser maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010 – 2015 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2011 – 2015 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB meningkat, yaitu 10,22 persen (2011); 11,30 persen (2012); 12,11 persen (2013); 12,57 persen (2014); dan 13,56 persen (2015).

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Paser
Tahun 2011—2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.448,16	3.964,98	4.472,39	4.932,08	5.189,65
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.231,11	3.491,41	3.695,48	3.905,39	3.973,84
Proporsi terhadap PDRB(% ADHB)	10,22	11,30	12,11	12,57	13,56
Rata-rata konsumsi per-Kapita(Ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	14.501,27	16.242,52	17.890,20	19.252,77	19.785,10
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	13.588,46	14.302,55	14.782,46	15.245,01	15.149,93
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	5,08	8,06	5,84	5,68	1,75
b. Perkapita	2,39	5,26	3,36	3,13	-0,62
Jumlah penduduk	237.783	244.111	249.991	256.175	262.301

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara rata-rata, pertumbuhan konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami perlambatan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2011, Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut meningkat sebesar 5,08 persen (2011); dan terus melambat pertumbuhannya sampai hanya sebesar 1,75 persen (2015). Sementara untuk rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita juga mengalami perlambatan dan berkontraksi pada tahun 2015 sebesar 0,62 persen, Hal ini disebabkan oleh perekonomian kabupaten paser yang mengalami kontraksi pada tahun 2015, yang berimbas pada penurunan konsumsi rumah tangga per kapita.

Selama tahun 2011 s.d. 2015 pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman dan rokok berkisar antara 41,80 s.d. 42,92 persen. Kelompok ini merupakan yang terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga, artinya penduduk kabupaten paser paling besar menghabiskan pengeluaran konsumsi rumah tangganya untuk keperluan Makanan, minuman dan rokok. Untuk struktur konsumsi rumahtangga, dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Paser Tahun 2011—2015⁷ (Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	41,80	42,27	42,92	41,81	42,37
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,43	2,36	2,27	2,19	2,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,61	16,78	16,24	16,20	16,34
d. Kesehatan & Pendidikan	4,82	5,07	5,14	5,41	5,23
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,81	18,67	18,37	19,03	18,58
f. Hotel & Restoran	10,58	10,90	11,22	11,67	12,01
g. Lainnya	3,95	3,94	3,83	3,69	3,37
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,72 persen, terutama yang mengalami peningkatan tertinggi pada harga kelompok kesehatan dan pendidikan.

Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser Tahun 2011—2015⁸ (Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,77	8,47	8,69	2,45	3,97
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,84	2,69	5,44	2,93	0,97
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,23	3,50	5,17	5,69	4,55
d. Kesehatan & Pendidikan	19,99	9,23	5,70	8,52	1,58
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,42	4,33	4,42	5,91	1,43
f. Hotel & Restoran	6,38	6,07	7,55	7,16	6,37
g. Lainnya	11,99	7,07	-1,51	-0,56	-3,50
Total Konsumsi	6,72	6,42	6,57	4,35	3,41

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	31,80	35,19	42,85	52,80	60,92
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	30,22	31,78	36,77	42,66	46,57
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,09	0,10	0,12	0,13	0,16
Pertumbuhan (ADHK 2010)	5,80	5,17	15,71	16,02	9,16

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2011 konsumsi LNPRT sebesar 31,8 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 35,19 miliar rupiah (2012), 42,85 miliar rupiah (2013), 52,80 miliar rupiah (2014) dan 60,92 miliar rupiah (2015). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2011 juga berturut-turut adalah 5,80 persen (2011), 5,17 persen (2012), 15,71 persen (2013), 16,02 persen (2014), dan 9,16 persen (2015). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2015, karena adanya Pemilu Presiden secara langsung dan Pemilu Legislatif pada tahun 2014 dan Pilkada Serentak pada tahun 2015.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu

adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri :

a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.

b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2011- 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	843,17	1.028,90	1.201,84	1.387,99	1.401,21
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	828,68	934,38	1.030,06	1.020,96	874,34
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,50	2,93	3,26	3,54	3,66
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	3.545,98	4.214,87	4.807,52	5.418,13	5.341,99
b. ADHK 2010	3.485,01	3.827,68	4.120,39	3.985,38	3.333,35
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total konsumsi pemerintah	14,62	12,76	10,24	-0,88	-14,36
b. Konsumsi perkapita	11,68	9,83	7,65	-3,28	-16,36
Jumlah penduduk (jiwa)	237.783	244.111	249.991	256.175	262.301

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, atas dasar harga berlaku sedangkan atas dasar harga konstan 2010 berfluktuatif. Pada tahun 2011 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 843,17 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.028,90 miliar rupiah (2012), 1.201,84 miliar rupiah (2013), 1.387,99 miliar rupiah (2014) dan 1.401,21 miliar rupiah (2015). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan pada tahun 2011 s.d. 2013 dan penurunan dari tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa

secara nilai (ADHB) memang naik tetapi hal itu masih dipengaruhi oleh indeks harga, sedangkan jika kita keluarkan pengaruh harga maka nilainya jadi berfluktuatif.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 2,5 persen (tahun 2011) hingga mencapai 3,66 persen (tahun 2015). Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan penurunan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Pada Tahun 2011 s.d. 2013, pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah terus mengalami perlambatan, dari 14,62 persen pada tahun 2011 menjadi 10,24 persen pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 0,88 persen dan terus menurun di tahun 2015 menjadi 14,36, begitu juga jika dilihat dari pertumbuhan konsumsi perkapitanya, terus melambat, dan menurun di tahun 2014 dan 2015.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (enam) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2010 – 2015 berfluktuasi dari 20,07 persen (2011) menjadi -3,93 persen (2015), Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2011, hal ini disebabkan oleh meningkatnya investasi PMA, PMDN dan investasi lainnya baik yang berhubungan dengan konstruksi atau Non Konstruksi, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 11 berikut :

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 11. Perkembangan PMTB Kabupaten Paser
Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	5.041,98	5.566,73	6.690,78	6.761,55	6.667,95
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4.813,62	5.216,23	5.945,15	6.006,64	5.770,43
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	14,94	15,86	18,12	17,23	17,42
Pertumbuhan					
Total PMTB (% ADHK)	20,07	8,36	13,97	1,03	-3,93

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 12. Perkembangan Perubahan Inventori
Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	208,45	238,64	247,01	349,64	369,65
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	181,51	211,89	222,70	306,35	313,52
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,62	0,68	0,67	0,89	0,97

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada tahun 2011 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 208,45 miliar rupiah, yang kemudian terus meningkat pada tahun pada tahun 2015 sebesar 369,65 miliar rupiah. Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Paser mengalami kenaikan. Pada tahun 2011, proporsi perubahan inventori adalah 0,62 persen, selanjutnya 0,68 persen (2012), 0,67 persen (2013), 0,89 persen (2014), dan 0,97 persen (2015).

3.2.6. Ekspor Neto

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Paser, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Paser. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Paser di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Paser terhadap

ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kabupaten Paser lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 13. Perkembangan Ekspor Neto Kabupaten Paser Tahun 2011 —2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Neto					
a. ADHB (Miliar Rp)	24.171,22	24.259,00	24.261,41	25.765,83	24.585,17
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	20.298,11	21.274,55	22.351,06	23.501,34	23.468,08
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	71,63	69,13	65,72	65,65	64,23
Pertumbuhan (% ADHK)	5,82	4,81	5,06	5,15	-0,14

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Ekspor Neto merupakan hasil pengurangan dari nilai Ekspor dan nilai Impor. Dikarenakan Ekspor Neto selalu bernilai positif maka dapat dikatakan neraca perdagangan Kabupaten Paser selalu positif (surplus), dikarenakan nilai Ekspor selalu lebih tinggi dari nilai Impor. Komoditi yang menjadikan nilai Ekspor sangat tinggi ialah Batubara dan Minyak mentah olahan kelapa sawit (CPO dll). Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2011-2015 nilai Ekspor Neto cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2011 nilai Ekspor Neto sebesar 24.171,22 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 25.765,83 miliar rupiah pada tahun 2014 dan menurun pada tahun 2015 menjadi 24.585,17 miliar rupiah.

Sejalan dengan nilai Ekspor Neto atas dasar harga Berlaku, nilai Ekspor Neto atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 20.298,11 miliar rupiah (2011); 21.274,55 miliar rupiah (2012); 22.351,06 miliar rupiah (2013) 23.501,34 miliar rupiah (2014) dan turun menjadi 23.468,08 miliar rupiah (2015). Penurunan Ekspor Neto pada tahun 2015 disebabkan oleh penurunan Ekspor komoditi unggulan Batubara yang mengalami penurunan produksi, disebabkan oleh Harga di pasar internasional belum stabil.

Proporsi dalam PDRB justru terus mengalami penurunan dari 71,63 persen pada tahun 2011 menjadi 64,23 persen di tahun 2015. Penurunan proporsi ini menyebabkan peningkatan proporsi pada komponen lain. Komoditi yang di Ekspor dari Kabupaten Paser ialah komoditi Ekspor Non Migas diantaranya : Batubara, Minyak Mentah Olahan Kelapa Sawit (CPO dan Kernel) dan Hasil Perikanan. Sedangkan Komoditi yang di Impor diantaranya : Mesin, Barang-barang Elektronik, Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Industri sampai dengan barang-barang konsumsi.

BAB 4
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
KABUPATEN PASER
MENURUT PENGELUARAN
2011 - 2015



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Paser di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Paser Tahun 2011—2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	33.744,79	35.093,42	36.916,27	39.249,89	38.274,55
- ADHK 2010	29.383,23	31.160,23	33.281,22	34.783,34	34.446,79
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	141.914,21	143.760,10	147.670,38	153.215,13	145.918,42
- ADHK 2010	123.571,64	127.647,78	133.129,65	135.779,59	131.325,42
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	5,53	3,30	4,29	1,99	-3,28
Jumlah penduduk (jiwa)	237.783	244.111	249.991	256.175	262.301
Pertumbuhan Penduduk	2,63	2,66	2,41	2,47	2,39

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan menurun di tahun 2015 (tabel 14), penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan nominal PDRB di tahun yang sama. Pada tahun 2011 pertumbuhan PDRB per-kapita sebesar 5,53 persen, sedangkan pada tahun 2015 menurun sebesar 3,28 persen. Pada tahun 2011 sampai 2013, pertumbuhan PDRB per-kapita ini masih di atas pertumbuhan penduduk yang ada, tapi pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhannya telah berada di bawah pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (persen)

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
<i>(Miliar Rp)</i>					
a. Rumah tangga	3.448,16	3.964,98	4.472,39	4.932,08	5.189,65
b. LNPRT	31,80	35,19	42,85	52,80	60,92
c. Pemerintah	843,17	1.028,90	1.201,84	1.387,99	1.401,21
Jumlah	4.323,13	5.029,06	5.717,07	6.372,86	6.651,78
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	33.744,79	35.093,42	36.916,27	39.249,89	38.274,55
Proporsi	12,81	14,33	15,49	16,24	17,38

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari tabel 15, terlihat bahwa proporsi pengeluaran konsumsi akhir terus meningkat setiap tahun, dari 12,81 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 17,38 persen pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena terus meningkatnya pengeluaran konsumsi akhir, yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi akhir untuk rumah tangga, salah satu penyebabnya ialah peningkatan jumlah penduduk dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2015 konsumsi akhir mencapai 6.651,78 miliar rupiah, yang terdiri dari 5.189,65 miliar rupiah konsumsi rumah tangga, 60,92 miliar rupiah konsumsi LNPRT dan 1.401,21 miliar rupiah konsumsi pemerintah.

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio kenaikan output akibat kenaikan modal adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu wilayah. "ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan modal terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan modal terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan modal sebanyak "K" unit. ICOR secara konsep dirumuskan: :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Sebagai ilustrasi, arti dari angka *ICOR* sebesar 3,0 adalah agar output perekonomian naik satu rupiah dibutuhkan tambahan modal senilai 3,0 rupiah. Perhitungan angka *ICOR* biasanya bukan dari perubahan modal dan output tahun per tahun, melainkan dihitung dalam selang waktu yang relatif panjang, misalnya 5 tahun. Sebab penambahan modal pada tahun ini tidak otomatis diikuti oleh penambahan output pada tahun ini juga, melainkan baru akan muncul pada satu atau dua tahun yang akan datang. Selain itu masa yang dibutuhkan dari waktu penambahan modal sampai dengan menghasilkan output akan berbeda-beda dari sektor yang satu dengan sektor lainnya. Sebagai contoh penambahan modal (investasi) pada sektor bangunan akan mendatangkan output paling cepat pada 2-3 tahun yang akan datang. Di sisi lain penambahan modal (investasi) untuk kegiatan perdagangan, dipastikan akan mendatangkan output dalam jangka waktu kurang dari satu tahun setelah investasi.

Dalam prakteknya penerapan formula *ICOR* seperti dicantumkan di atas mengalami kesulitan, terutama dalam menaksir tingkat output. Untuk itu kemudian nilai output diganti oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga konsep praktis perhitungan *ICOR* diformulasikan menjadi :

$$ICOR = \frac{I_t}{PDRB_t - PDRB_{t-1}}$$

Berdasarkan formula diatas maka makna *ICOR* sedikit berubah menjadi berapa rupiah investasi yang diperlukan untuk menambah satu rupiah PDRB. Kemudian mengingat *ICOR* harus dihitung dalam selang waktu yang relatif lama, maka berikut adalah formulasi *ICOR* yang dihitung dari tahun *m* hingga *n* :

$$ICOR_{m \rightarrow n} = \frac{\sum_{i=m}^n I_{i-1}}{PDRB_n - PDRB_m}$$

Efisiensi investasi dapat dilihat dari berapa besar koefisien *ICOR* yang diperoleh¹⁰. *World economic study* menjelaskan bahwa 70% negara berkembang memiliki rasio modal output antara 3 dan 4 (Jhingan, 617:2007). Rosenstein-Rodan dan Lewis (Arsyad, 232:2005) memperkirakan bahwa rasio efisiensi investasi terletak antara 3 sampai 4. Artinya bahwa investasi dikatakan efisien apabila nilai *ICOR* yang diperoleh berada antara 3 dan 4. Apabila nilai *ICOR* semakin kurang dari 3 maka dapat dikatakan investasi tersebut sangat efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan apabila nilai *ICOR* melebihi 4 atau bernilai negatif maka dapat dikatakan investasi tersebut semakin tidak efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 16. *Incremental Capital Output Ratio*, Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDRB (ADHK 2010)	29.383,23	31.160,23	33.281,22	34.783,34	34.446,79
(miliar rupiah)					
Perubahan	2.252,45	1.776,99	2.120,99	1.502,12	-336,55
(miliar rupiah)					
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	4.813,62	5.216,23	5.945,15	6.006,64	5.770,43
ICOR	2,14	2,94	2,80	4,00	-17,15
ICOR (2010 - 2015)					4,34

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari tabel 16 terlihat bahwa periode 2011 s.d. 2014 nilai *ICOR* cenderung meningkat, dan pada tahun 2015 bernilai negatif, namun jika lihat nilai *ICOR* tahun 2010 – 2015 bernilai 4,34. Yang mengindikasikan bahwa nilai investasi di Kabupaten Paser masih belum efisien dalam meningkatkan nilai PDRB, tetapi investasi tetap harus terus ditingkatkan guna menunjang pembangunan, baik dalam sektor Konstruksi maupun Non-Konstruksi.

<http://paserkab.bps.go.id>

BAB 5
PENUTUP

<http://paserkab.bps.go.id>



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2011 s.d 2015 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Paser pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah.
2. Data yang disajikan dalam bentuk series, dari tahun 2011 s.d 2015, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
3. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser pada tahun 2015 mencapai 38,27 triliun rupiah yang berkurang 975 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada komponen Ekspor Neto yang memiliki distribusi terbesar dari PDRB menurut pengeluaran.
4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada kurun waktu 2011 – 2015 terus mengalami pelemahan, dan pada tahun 2015 mengalami kontraksi sebesar 0,97%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya ekspor neto (-0,14 %), PMTB (-3,93 %) dan konsumsi pemerintah (14,36 %), walaupun komponen yang lain masih mengalami pertumbuhan.
5. Proporsi konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT dan pemerintah), selalu mengalami peningkatan, dari 12,81 persen pada tahun 2011, naik menjadi 17,38 persen pada tahun 2015.
6. Investasi di Kabupaten Paser terbilang belum efisien dalam meningkatkan nominal PDRB karena nilai ICOR Kabupaten Paser dari tahun 2010 - 2015 berada diatas 4.

LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3.448.156,07	3.964.976,95	4.472.388,94	4.932.077,19	5.189.650,36
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	1.441.380,55	1.676.159,82	1.919.592,68	2.062.093,67	2.198.782,07
1.b. Pakaian	83.851,70	93.383,01	101.741,07	107.951,64	109.192,86
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	607.383,13	665.469,30	726.537,95	799.062,70	847.836,57
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	166.206,93	201.192,97	229.934,16	266.962,98	271.196,70
1.e. Transportasi dan komunikasi	648.473,15	740.457,81	821.552,01	938.643,71	963.983,93
1.f. Restoran dan Hotel	364.682,44	432.052,36	501.607,45	575.538,52	623.517,92
1.g. Lainnya	136.178,18	156.261,69	171.423,62	181.823,96	175.140,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	31.800,62	35.191,63	42.848,02	52.797,12	60.922,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	843.173,96	1.028.895,40	1.201.835,73	1.387.989,05	1.401.209,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5.041.983,32	5.566.726,81	6.690.777,88	6.761.554,38	6.667.950,65
5. Perubahan Inventori	208.450,14	238.635,27	247.010,48	349.638,70	369.648,63
6. Ekspor Neto	24.171.223,66	24.258.995,53	24.261.405,94	25.765.829,71	24.585.166,17
P D R B	33.744.787,77	35.093.421,58	36.916.266,99	39.249.886,15	38.274.547,11

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3.231.105,73	3.491.409,32	3.695.481,21	3.905.389,53	3.973.840,87
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	1.349.955,02	1.447.243,70	1.524.876,51	1.598.836,27	1.639.647,34
1.b. Pakaian	79.982,53	86.738,48	89.629,54	92.395,61	92.562,22
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	577.187,91	610.996,64	634.279,99	660.058,55	669.856,37
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	138.513,20	153.499,80	165.962,54	177.562,05	177.572,41
1.e. Transportasi dan komunikasi	621.052,38	679.720,92	722.262,88	779.153,98	788.918,87
1.f. Restoran dan Hotel	342.815,58	382.895,89	413.319,61	442.566,78	450.754,64
1.g. Lainnya	121.599,12	130.313,89	145.150,14	154.816,30	154.529,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	30.216,84	31.777,73	36.770,13	42.660,39	46.566,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	828.676,42	934.378,62	1.030.060,46	1.020.955,68	874.340,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4.813.621,29	5.216.225,91	5.945.147,39	6.006.644,73	5.770.434,07
5. Perubahan Inventori	181.507,71	211.889,54	222.698,02	306.348,22	313.524,20
6. Ekspor Neto	20.298.106,36	21.274.545,14	22.351.058,17	23.501.337,88	23.468.083,37
P D R B	29.383.234,35	31.160.226,26	33.281.215,38	34.783.336,43	34.446.789,62

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	10,22	11,30	12,11	12,57	13,56
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	4,27	4,78	5,20	5,25	5,74
1.b. Pakaian	0,25	0,27	0,28	0,28	0,29
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	1,80	1,90	1,97	2,04	2,22
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,49	0,57	0,62	0,68	0,71
1.e. Transportasi dan komunikasi	1,92	2,11	2,23	2,39	2,52
1.f. Restoran dan Hotel	1,08	1,23	1,36	1,47	1,63
1.g. Lainnya	0,40	0,45	0,46	0,46	0,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,09	0,10	0,12	0,13	0,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,50	2,93	3,26	3,54	3,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	14,94	15,86	18,12	17,23	17,42
5. Perubahan Inventori	0,62	0,68	0,67	0,89	0,97
6. Ekspor Neto	71,63	69,13	65,72	65,65	64,23
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2010 – 2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	11,00	11,20	11,10	11,23	11,54
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	4,59	4,64	4,58	4,60	4,76
1.b. Pakaian	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	1,96	1,96	1,91	1,90	1,94
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,47	0,49	0,50	0,51	0,52
1.e. Transportasi dan komunikasi	2,11	2,18	2,17	2,24	2,29
1.f. Restoran dan Hotel	1,17	1,23	1,24	1,27	1,31
1.g. Lainnya	0,41	0,42	0,44	0,45	0,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,10	0,10	0,11	0,12	0,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,82	3,00	3,10	2,94	2,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	16,38	16,74	17,86	17,27	16,75
5. Perubahan Inventori	0,62	0,68	0,67	0,88	0,91
6. Ekspor Neto	69,08	68,27	67,16	67,56	68,13
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	12,14	14,99	12,80	10,28	5,22
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	10,66	16,29	14,52	7,42	6,63
1.b. Pakaian	7,73	11,37	8,95	6,10	1,15
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	7,34	9,56	9,18	9,98	6,10
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	27,25	21,05	14,29	16,10	1,59
1.e. Transportasi dan komunikasi	11,88	14,18	10,95	14,25	2,70
1.f. Restoran dan Hotel	15,47	18,47	16,10	14,74	8,34
1.g. Lainnya	32,76	14,75	9,70	6,07	-3,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	11,35	10,66	21,76	23,22	15,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,63	22,03	16,81	15,49	0,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	25,76	10,41	20,19	1,06	-1,38
5. Perubahan Inventori	82,93	14,48	3,51	41,55	5,72
6. Ekspor Neto	26,01	0,36	0,01	6,20	-4,58
P D R B	24,38	4,00	5,19	6,32	-2,48

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,08	8,06	5,84	5,68	1,75
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	3,64	7,21	5,36	4,85	2,55
1.b. Pakaian	2,76	8,45	3,33	3,09	0,18
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	2,00	5,86	3,81	4,06	1,48
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,05	10,82	8,12	6,99	0,01
1.e. Transportasi dan komunikasi	7,15	9,45	6,26	7,88	1,25
1.f. Restoran dan Hotel	8,54	11,69	7,95	7,08	1,85
1.g. Lainnya	18,55	7,17	11,39	6,66	-0,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,80	5,17	15,71	16,02	9,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,62	12,76	10,24	-0,88	-14,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	20,07	8,36	13,97	1,03	-3,93
5. Perubahan Inventori	59,29	16,74	5,10	37,56	2,34
6. Ekspor Neto	5,82	4,81	5,06	5,15	-0,14
P D R B	8,30	6,05	6,81	4,51	-0,97

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2015 (2010 = 100)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	106,72	113,56	121,02	126,29	130,60
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	100,00	106,77	115,82	125,89	128,97	134,10
1.b. Pakaian	100,00	104,84	107,66	113,51	116,84	117,97
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	100,00	105,23	108,92	114,55	121,06	126,57
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	119,99	131,07	138,55	150,35	152,72
1.e. Transportasi dan komunikasi	100,00	104,42	108,94	113,75	120,47	122,19
1.f. Restoran dan Hotel	100,00	106,38	112,84	121,36	130,05	138,33
1.g. Lainnya	100,00	111,99	119,91	118,10	117,44	113,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	100,00	105,24	110,74	116,53	123,76	130,83
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	101,75	110,12	116,68	135,95	160,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	104,74	106,72	112,54	112,57	115,55
5. Perubahan Inventori	100,00	114,84	112,62	110,92	114,13	117,90
6. Ekspor Neto	100,00	119,08	114,03	108,55	109,64	104,76
PDRB	100,00	114,84	112,62	110,92	112,84	111,11

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran , Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2015 (persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,72	6,42	6,57	4,35	3,41
1.a. Makanan dan Minuman, selain restoran	6,77	8,47	8,69	2,45	3,97
1.b. Pakaian	4,84	2,69	5,44	2,93	0,97
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	5,23	3,50	5,17	5,69	4,55
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	19,99	9,23	5,70	8,52	1,58
1.e. Transportasi dan komunikasi	4,42	4,33	4,42	5,91	1,43
1.f. Restoran dan Hotel	6,38	6,07	7,55	7,16	6,37
1.g. Lainnya	11,99	7,07	-1,51	-0,56	-3,50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,24	5,23	5,23	6,21	5,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,75	8,22	5,96	16,52	17,88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,74	1,89	5,46	0,02	2,65
5. Perubahan Inventori	14,84	-1,93	-1,51	2,90	3,30
6. Ekspor Neto	19,08	-4,24	-4,81	1,00	-4,45
PDRB	14,84	-1,93	-1,51	1,73	-1,53

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<http://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<http://paserkab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital : Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.